



# GELAGAT GANJAL PENUNTASAN KASUS SAMBO

## Jadi Tersangka Obstruction of Justice, Ditemukan Extrajudicial killing

**G**elagat ganjal mencuat dalam proses penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat). Jeratan pasal 340 subsider pasal 340 subsider diprediksi maksimal hanya akan menghukum Ferdy Sambo 15 tahun penjara. Berbeda bila juncto atau kumulatif, permintaan masyarakat agar diterapkan hukuman mati sebagai sanksi maksimal pun berpeluang diputuskan. Sinyal kurang baik juga di keluarkan Komnas HAM. Video animasi yang dirilis resmi Polri, dinilai telah disesuaikan dengan skenario Sambo. Artinya ada bagian yang tidak dimuat dalam video tersebut. Di sisi lain dalam kasus tersebut ditemukan extrajudicial killing. Yaitu tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seseorang meninggal tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh Aparat Negara. Kini Sambo juga resmi ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice (upaya menghalang-halangi proses hukum).

(Baca Hal 11)

### KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN KOMNAS HAM TERKAIT KASUS BRIGADIR J

- 1) Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas eks Kadiv Propam di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan;
- 2) Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan Extra Judicial Killing;
- 3) Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak.
- 4) Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Sdri. PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022;
- 5) Terjadinya Obstruction of Justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.

Sumber : Berbagai Sumber Diolah

### TIGA SANKSI BAGI YANG MENGHALANGI HUKUM REKOM KOMNAS HAM :

- 1. SANKSI PIDANA DAN PEMECATAN**  
Komnas HAM meminta Polri memberikan sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengonsolidasikan personel kepolisian, dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J.
- 2. SANKSI ETIK BERAT/KELEMBAGAAN**  
Komnas HAM meminta Polri memberikan sanksi etik berat/kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J.
- 3. SANKSI ETIK RINGAN/KEPRIBADIAN**  
Komnas HAM meminta Polri memberikan sanksi etik ringan/kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan/atau obstruction of justice.



**GOVERNMENT (HAL.2)**  
Soal 1,3 Miliar Data  
SIM Card Bocor,  
Kominfo Menepis

# Soal 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo Menepis



Menteri Kominfo Johnny Plate

**JAKARTA-** Sedikitnya 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM card diduga bocor dan dijual di pasar gelap. Data ini diduga berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo).

Hal ini diketahui dari unggahan akun Twitter @Srifqi. "1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI," tulisnya seperti dilihat, Kamis (1/9).

Dalam unggahan itu tertulis keterangan tentang jumlah data dan harga yang dipatok. Terlihat juga logo Kominfo. Seperti diketahui, pengguna telepon seluler wajib mendaftarkan kartu SIM card prabayar ke Kominfo untuk aktivasi. Aturan ini diberlakukan mulai 31 Oktober 2017. Registrasi kartu prabayar dapat dilakukan dengan cara online melalui situs resmi maupun SMS ke 4444.

Sementara, dalam postingan di forum breached.to, seorang pengguna dengan nama Bjorka memposting data tersebut. Menurutnya, data berukuran 87 GB tersebut berisi data dari 1,3 miliar pendaftar.

Datanya sendiri menurutnya berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, tanggal registrasi. Ia pun memberikan contoh yang bisa didapat gratis berisi dua juta pendaftar. Sementara untuk menebus data secara penuh, harganya adalah USD 50.000.

Akun Bjorka yang menjual kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar itu mengklaim kalau data yang bocor tersebut bersumber dari Kominfo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba membantah kebocoran data tersebut dari Kominfo. "Bukan dari kita dan formatnya juga beda. Yang ngecek Pak Ismail (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo)," kata Mira kepada wartawan di sela-sela acara Digital Economy Minister Meeting di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali.

Sejauh ini, Kominfo telah melakukan penelusuran secara

internal. Dari penelusuran itu, Kominfo menyebutkan bahwa pihaknya tidak menampung data-data kartu SIM milik para pelanggan seluler masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, secara tegas membantah tuduhan dugaan kebocoran

data pendaftaran kartu SIM prabayar seluler itu berasal dari mereka atau Kominfo. Johnny pun berjanji akan segera melakukan audit untuk mencari asal usulnya.

"Yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo. Data itu tidak ada di Kominfo. Tapi atas mandat peraturan dan perundangan, Direktorat Jenderal dan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan data itu sebenarnya apa statusnya," kata Menkominfo di sela Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aksi selanjutnya dari Kominfo adalah dengan melakukan pemeriksaan sesuai aturan. Ia juga belum dapat menentukan dari mana sumbernya, termasuk apakah berasal dari operator telekomunikasi.

"Menteri tak boleh duga, harus pasti. Untuk pasti harus audit dulu. Kapan? Tergantung kebocorannya kalau ada," papar Menkominfo. Ia juga mewanti-wanti agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) benar-benar menjaga data pribadi dari para pengguna.

### 3 Pihak yang Punya

Pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam keterangan resminya menjelaskan kebocoran tersebut diunggah hari Selasa siang 31 Agustus oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'. Usut punya usut, Bjorka sebelumnya juga membocorkan data riwayat pelanggan Indihome beberapa waktu lalu. Pengunggah juga memberikan sample data sebanyak 1,5 juta data.

"Jika diperiksa, sample data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi sim card milik masyarakat Indonesia", terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya. Ini berarti dari 1,5 juta sampel data tersebut merupakan data yang valid. Untuk mengecek apakah data kita termasuk kedalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak, bisa menggunakan situs [www.periksadata.com](http://www.periksadata.com) dengan memasukkan nomor ponsel.

"Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas. Dari pihak Kominfo, Dukcapil, maupun Operator seluler juga telah membantah datanya dari server mereka," kata Pratama.

Dia menyebutkan, "Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, Operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sample datanya lintas operator."

Karena pihak terkait membantah kebocoran data tersebut dari server mereka, maka jalan terbaik harus

dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana. "Sangat mustahil jika data yang bocor ini tidak ada yang mempunyainya," ucapnya.

Berdasarkan analisa dan informasi yang Pratama dan timnya kumpulkan, sample data yang dibagikan gratis itu hanya dimiliki oleh Kominfo. "Namun kalau kita melihat sample data yang datanya dari semua operator maka seharusnya cuma Kominfo yang bisa mempunya data ini, Tapi kita perlu pastikan dulu," imbuhnya.

Ditambahkan Pratama jika data ini benar, artinya semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor baik itu sim card prabayar maupun pascabayar. Dan sangat rawan sekali data ini jika digabungkan dengan data - data kebocoran yang lain, bisa menjadi data profile lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

"Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu," kata pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Akibatnya banyak terjadi kebocoran data, namun tidak ada yang bertanggungjawab, semua merasa menjadi korban. "Padahal soal ancaman peretasan ini sudah diketahui luas, seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi/penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan." (hiski,rls/dya)



## 13 SERANGAN SIBER YANG MENIMPA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L) SERTA BUMN

1. Indihome, Telkom pada Minggu (21/8)
2. PLN pada Jumat (19/8)
3. Badan Intelijen Negara pada Minggu (21/8)
4. Kepolisian pada Minggu (21/8) dan November 2021
5. Bank Indonesia pada Januari 2022
6. Kemenkes pada Januari 2022 dan Agustus 2021
7. BSSN pada Oktober 2021
8. Sertifikat vaksinasi Jokowi pada September 2021
9. BPJS Kesehatan pada Mei 2021
10. BRI Life pada Juli 2021
11. DPR pada Oktober 2020
12. Kemendikbud pada Mei 2020
13. KPU pada Mei 2020

Tangkapan Layar Terkait Informasi Kebocoran Data Pribadi Yang Bersumber Dari Kominfo



# Fraksi di DPR Mayoritas Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi



(Ilustrasi) Antrean pembelian pertalite di SPBU sempat terjadi pada Rabu, (31/8/2022) malam saat isu kenaikan harga santer terdengar. (Foto-dokist)

**JAKARTA-** Di saat masyarakat menunggu pengumuman resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah malah menurunkan harga BBM Nonsubsidi. DPR RI pun tampaknya keukeuh menolak kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi. Hampir seluruh fraksi di DPR satu pendapat bila dipaksakan naik akan merugikan rakyat.

Kabar terbaru, Pemerintah telah merampungkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut informasi yang berkembang, draf revisi saat ini berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Saleh Abdurrahman berharap revisi Perpres ini nantinya akan merinci siapa yang berhak menerima subsidi. Sebagai contoh, Solar. Sekarang kendaraan berplat kuning roda enam dan lain-lain pada prakteknya membawa barang mahal, namun masih memakai BBM subsidi. "Ke depan kita usulkan mobil sembako yang boleh isi solar subsidi," kata Saleh, Kamis (1/9).

Untuk diketahui, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, enam fraksi menyatakan menolak jika BBM dinaikkan. Mereka yang menolak di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan partainya tidak ingin ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Pernyataan Andre tersebut merupakan perwakilan sikap dari Fraksi Gerindra. "Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, kami Fraksi

Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kami mengusulkan kepada pemerintah, harapan kami, jangan ada kenaikan BBM. Kasihan masyarakat," jelas Andre dikutip Kamis (1/9).

Konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite, kata Andre tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kilo liter (kl). Sementara itu, kuota yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta kiloliter dan diprediksi akan habis pada September 2022.

Untuk mengatasi hal tersebut, Andre mengatakan, dirinya sejak jauh-jauh hari telah meminta pemerintah menambah kuota Pertalite. Sejalan dengan itu, dia mengatakan perlunya pemerintah segera menerbitkan aturan pengendalian agar distribusi Pertalite lebih tepat sasaran.

Sementara dari pihak yang setuju, Ketua Komisi VII DPR fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan.

Oleh karena itu, menurut Sugeng total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai sekira 70% sampai 80%. "Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil, bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan," jelas Sugeng melalui siaran resminya.

Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian. "Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

## PDIP Terbelah

Menariknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi partai koalisi pemerintah ikut bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam golongan abstain. Tidak hanya itu, di beberapa kesempatan anggotanya ada yang menolak dengan keras dan ada yang mendorong kenaikan harga BBM.

Anggota Komisi XI fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan dirinya menyerahkan keputusan kenaikan harga BBM ke

pemerintah. "Keputusan ada di tangan Presiden (Joko Widodo), karena beliau juga yang akan memitigasi. Saya melihat momennya ada di pemerintah, karena keseimbangan dari daya beli, jelas Andreas.

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai pemerintah seharusnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. "Alokasi APBN untuk subsidi energi mencapai Rp502 triliun. Artinya, subsidi naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, namun terjadi kontradiksi yaitu harga BBM bersubsidi justru direncanakan akan naik," ungkapnya.

Ketidaksepakatan dirinya kembali ditunjukkan dalam postingan Instagram. Dia mempertanyakan nomenklatur kompensasi BBM yang tidak tercantum dalam Perpres 98/2022. Perpres ini memuat revisi atas Perpres No.104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.

Dalam Perpres tersebut, menurut Rieke, tercantum perihal subsidi BBM senilai Rp14,57 triliun. Namun, Rieke tidak menemukan kompensasi BBM yang selama dibayarkan kepada Pertamina untuk membayar kelebihan harga Pertalite.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengumumkan bahwa Perpres 98/2022 mengakomodir subsidi BBM yang naik tiga kali lipat menjadi Rp502,4 triliun. "Lalu darimana angka subsidi + kompensasi sebesar Rp 502,4 triliun yang disebut-sebut Menteri Keuangan? Padahal angka kompensasi BBM itu sendiri, tidak ada dalam Perpres No.98/2022," ungkap postingan yang diunggah di Instagram-nya @riekediahp, dikutip Kamis (1/9).

Dalam postingannya, Rieke pun memuat rincian dokumen rincian anggaran yang menjabarkan subsidi energi. Dari dokumen tersebut, jelas tidak ada nomenklatur kompensasi BBM. Akibat ketidakjelasan nomenklatur ini, Rieke melihat alasan untuk menaikkan harga BBM tidak kuat dan tidak berdasarkan fakta.

"Pada akhirnya sebenarnya bukan soal BBM naik atau tidak naik (kl ngotot mau naikan hanya berdasarkan asumsi bukan fakta).. pada akhirnya dimana pertanggungjawaban ratusan triliun uang rakyat (APBN uang rakyat)...kalau indikasi kuatnya diputuskan tanpa berbasis data yang akurat dan aktual," tulis Rieke.

Tidak tanggung-tanggung, Rieke pun menyebutkan Instagram Presiden Joko Widodo @jokowi. "Barangkali suara ini hanya dianggap angin lalu... @jokowi," tegasnya dalam postingan tersebut.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berasal dari Partai PDIP Said Abdullah menyetujui rencana kenaikan harga

Pertalite. Dia menilai selama ini subsidi yang diberikan memang tidak tepat sasaran dan justru banyak dinikmati orang mampu. "Subsidi BBM ini dirasa tidak tepat sasaran. Sudah saatnya kita mendukung pengurangan subsidi energi dan direlokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM atau fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. Artinya, subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," kata Said.

Menurutnya, subsidi BBM memang tidak tepat sasaran. Seharusnya BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan bermotor dan plat kuning (kendaraan umum) serta kendaraan taksi online. Namun, penikmat subsidi justru sebagian besar adalah orang kaya, di mana 80% Pertalite dikonsumsi kalangan mampu.

Di sisi lain, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPPI), Salamuddin Daeng berpendapat rencana pemerintah menaikkan harga BBM angkanya mesti disebutkan dengan jelas oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. "Bu Sri Mulyani harus menyebutkan angkanya dengan jelas untuk kompensasi atau subsidi langsung, jangan seperti angin, angkanya tidak berani sebut. Kalau merujuk UU No 2/2020 tentang Pemulihan Krisis, maka keputusan keuangan ada di Menteri Keuangan. Maka Bu Sri Mulyani harus umumkan angkanya secara pasti," tegas Daeng.

Daeng mewanti-wanti kalau nanti akan ada tambahan kuota di tahun ini. Kalau Pertamina hanya menjual separuh dari nilai keekonomiannya, maka subsidi ada separuh lagi sekitar Rp500 triliun. Namun jika ada kuota jebol 5-7 juta kilo liter tambahannya jelas. Kalau ada relokasi ada subsidi langsung kepada orang, maka angkanya harus disebutkan mekanismenya. (hiski,rls,ant/dya)

**TANGGAPAN 9 FRAKSI DI DPR TENTANG KENAIKAN HARGA BBM**

**6 FRAKSI MENOLAK**

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Demokrat
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

**2 FRAKSI ABSTAIN**

- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

**1 FRAKSI SETUJU**

- Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

# Temuan Baru, Kemenkes Ungkap 4 Warga Diduga Kena Cacar Monyet



(Ilustrasi) Petugas menunjukkan luka yang mulai mengering akibat infeksi cacar monyet. (Foto-dokAP)

**JAKARTA** - Kementerian Kesehatan RI kembali memperbarui data kasus cacar monyet di Indonesia, baik terkait kasus konfirmasi hingga suspek. Ada penambahan satu kasus suspek di Kepulauan Riau, sementara satu kasus suspek di Jawa Tengah dipastikan negatif cacar monyet atau masuk kategori discarded.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu, tiga kasus suspek cacar monyet lainnya berada di DKI Jakarta dan masih dalam pantauan otoritas kesehatan setempat. Adapun pasien terkonfirmasi cacar monyet sebelumnya sudah dinyatakan sembuh berdasarkan gejala klinis yang membaik.

"Ada empat kasus suspek cacar monyet, tiga laki-laki berusia 14-15 tahun. Sementara satu wanita berusia 29 tahun," terang dr Maxi Kamis (1/9).

Pada kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengingatkan ancaman penyakit zoonosis yang

diprediksi akan terus meningkat. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

Jokowi meminta kepada IPB sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia mempersiapkan diri dengan mempelajari dan menyiapkan pencegahan penularan penyakit zoonosis.

"Siapkan early warning zoonosis untuk menghadapi ancaman penyakit infeksius yang bersumber dari hewan, penyakit zoonosis diprediksi akan terus meningkat," ujar Jokowi saat Pembukaan Dies Natalis ke-59 Institut Pertanian Bogor (IPB) secara virtual pada Kamis (1/9).

"Kita harus pelajari ilmunya, kembangkan pengetahuannya untuk mengurangi ancaman yang membahayakan kesehatan manusia dan menekan risiko atas dampak yang diakibatkan," tambah Jokowi.

Sementara informasi terbaru dari penelitian internasional mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang terjangkit cacar monyet tanpa menunjukkan gejala umum yang biasa dialami oleh pasien cacar monyet.

Annals of Internal Medicine meluncurkan hasil penelitiannya terhadap beberapa orang untuk mendeteksi penyakit cacar monyet. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di Rumah Sakit Bichat Claude Bernard di Paris dengan melakukan serangkaian tes melalui tes swab anektoral.

Berdasarkan dari hasil tes yang dikumpulkan, 13 dari 200 orang terdeteksi positif cacar monyet, dan 2

orang diantaranya positif tanpa gejala. Tanpa gejala yang dimaksud disini adalah tidak ditemukannya demam, tidak ada tanda awal infeksi, tidak ada ruam atau lesi kulit, dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar getah bening.

Hasil tes tersebut didapatkan dari hasil skrining infeksi menular (IMS) rutin untuk pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL) yang memiliki banyak pasangan seksual, dan menggunakan profilaksis pra pajanan HIV (PrEP). Skrining tes yang dilakukan meliputi skrining Chlamydia trachomatis dan skrining Neisseria gonorrhoeae yang dilakukan setiap tiga bulan.

Terpisah, ketua sementara pengobatan darurat di Long Island Jewish Forest Hills di Queens, New York, Dr. Rachel Bruce menambahkan bahwa sangat sulit untuk membendung virus yang disebarkan oleh orang tanpa gejala karena mereka tidak mengetahui bahwa dirinya terjangkit suatu virus berbahaya sehingga tidak mengubah perilaku atau kebiasaannya.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat melaporkan 51.257 kasus monkeypox atau cacar monyet yang teridentifikasi di 98 negara di dunia. Melansir dari laman cdc.gov, negara nonendemik cacar monyet masih terus mendominasi jumlah kasus yang dicatat CDC hingga 31 Agustus 2022 tersebut.

Secara rinci, CDC melaporkan 50.814 kasus yang ditemukan di negara nonendemik cacar monyet dan 443 lainnya di negara endemik cacar monyet. Hingga saat ini, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan

catatan kasus cacar monyet terbanyak, dengan total sebanyak 18.988 kasus.

Kemudian disusul oleh Spanyol dengan 6.543 kasus, Brazil 4.693 kasus, Perancis 3.547, serta Jerman dengan total 3.467 kasus. Tingginya tingkat penyebaran cacar monyet secara global ini akhirnya mengharuskan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menetapkan virus tersebut sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) pada 23 Juli 2022 lalu. (hiski, reuters, cdc/dya)

## BERIKUT SEBARAN DATA KASUS CACAR MONYET

(Sumber Kemenkes RI 29 Agustus 2022)

Riau <b>1 discarded</b>	Jawa Timur <b>1 discarded</b>
Banten <b>2 discarded</b>	Jawa Timur <b>1 discarded</b>
DKI Jakarta <b>1 konfirmasi</b> <b>26 discarded</b> <b>3 suspek</b>	Sulawesi Tengah <b>2 discarded</b>
Jawa Barat <b>3 discarded</b>	Sulawesi Selatan <b>2 discarded</b>
Jawa Tengah <b>2 discarded</b>	Kepulauan Riau <b>1 discarded</b> <b>1 suspek</b>

## Mudahkan Akses Pelayanan Publik, Layanan Sayang Warga 'Jemput Bola' di Balai RW

**SURABAYA** - Para camat - lurah di Kota Surabaya membuka layanan Sayang Warga atau layanan publik secara serentak dan bergiliran di setiap Balai RW di lingkungannya masing-masing. Kini, setiap Selasa mulai pukul 18.00 - 20.00 WIB dan Jumat mulai pukul 08.00 - 11.00 WIB petugas akan melakukan 'jemput bola'.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa layanan Sayang Warga yang digelar serentak pada Selasa dan Jumat, bertujuan untuk mempermudah warga Kota Pahlawan dalam memanfaatkan pelayanan publik.

"Peran pemerintah fungsinya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang biasa dilakukan di kelurahan/kecamatan, kita lakukan pelayanan di seluruh Balai RW di seluruh Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (1/9).

Ia berharap, dengan pendekatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, warga bisa memanfaatkan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mulai dari jam operasional kerja, maupun jam operasional malam hari.

"Ketika ada warga Surabaya yang bekerja siang hari, dia biar bisa mengurus layanan publik itu malam hari. Jadi saya berharap warga ini semakin dekat dengan pelayanan publik. Baik mengurus KTP, KK, dan Akte apapun bisa mengurus di Balai RW," ujar dia.

Oleh sebab itu, menurutnya, sudah tidak ada alasan bagi warga Kota Surabaya untuk tidak memanfaatkan pelayanan publik. Sebab, kegiatan layanan Sayang Warga itu juga telah berjalan.

"Lebih dekat, jadi tidak ada alasan lagi karena jauh atau harus ke mall pelayanan publik. Saya ingin

mendekatkan layanan itu kepada masyarakat dan hal ini sudah berjalan," ungkap dia.

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut bahwa layanan Open House bagi camat, lurah, dan Kepala PD di lingkungan Pemkot Surabaya juga tetap digelar. Yakni, setiap Jumat, pukul 13.00 - 16.00 WIB. "Lurah - camat juga bisa menggelar di kelurahan/kecamatan atau keliling di Balai RW secara bergiliran," ujar dia.

Sedangkan, untuk kegiatan Sambat Warga Nang Cak Eri yang digelar rutin setiap Sabtu pukul 09.00 - 12.00 WIB, merupakan tindak lanjut dari Wali Kota Eri Cahyadi, apabila persoalan warga belum tuntas di tingkat kelurahan/kecamatan/PD selama 7 hari.



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

"Kalau saya Sabtu di Balai Kota Surabaya. Saya berharapnya, nanti lurah - camat tidak menggelar Open House di kantor, tapi di Balai RW secara bergiliran, jadi semakin dekat dengan masyarakat," pungkasnya. (mira, rls/dya)



# Rekomendasi 2 Opsi Pemilu di 3 Provinsi Baru Papua

**JAKARTA**-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan dua opsi untuk pengawas pemilu yang akan bertugas di daerah otonom baru (DOB) wilayah Papua pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga sedang menyusun simulasi penataan daerah pemilihan (dapil) pada daerah tersebut.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan opsi pertama yang direkomendasikan Bawaslu yakni membentuk Bawaslu Provinsi di tiga provinsi baru DOB Papua. Namun, pembentukan ini menurutnya harus dengan terlebih dahulu mengubah ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dilakukan perubahan terhadap Lampiran II UU tentang Pemilu tersebut.

"Setelah lampiran II UU 7/2017 diubah, maka Bawaslu RI dapat membentuk Tim Seleksi pembentukan Bawaslu Provinsi DOB atau dengan mekanisme penunjukan sementara," ungkap Bagja dalam keterangannya, Kamis (1/9).

Kedua, yakni Bawaslu Provinsi Papua menjalankan sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di DOB dengan menggunakan dua cara.

Cara pertama, menambahkan ketentuan dalam revisi UU 7/2017, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentuknya Bawaslu Provinsi DOB.

"Cara kedua, Bawaslu RI menerbitkan surat Keputusan Bawaslu RI yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentuknya Bawaslu Provinsi DOB," urai Bagja.

Lebih lanjut, Bagja juga mengingatkan dalam UU 7/2017 belum mengakomodir pengaturan DOB. Kata dia, hal ini berimplikasi pada sejumlah kompleksitas pengaturan terhadap kepesertaan dalam Pemilu 2024, daerah pemilihan (dapil), eksistensi penyelenggara pemilu, serta hak pilih.

Terkait validasi data pemilih di DOB Papua, Bagja mengungkapkan ada tiga potensi kerawanan yang perlu diantisipasi semua pihak, yakni, potensi terjadi penyalahgunaan data kependudukan atau penyalahgunaan suara pada saat pemilu, potensi menimbulkan masalah pemilih ganda yakni terdaftar di provinsi DOB, serta perlu migrasi/ perubahan secara cepat terkait administrasi kependudukan bagi warga DOB.

"Saat ini kami sedang melakukan simulasi untuk penataan dapil pemilu

anggota DPRD provinsi di 3 DOB. Nanti (hasil simulasi) akan kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah dalam RDP," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Kamis (1/9)

"Karena memang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai penetapan daerah pemilihan, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, itu sepenuhnya kewenangan para pembentuk undang-undang atau legal drafter, dalam hal ini pemerintah dan DPR," sambungnya.

Idham mengatakan KPU akan memberikan beberapa masukan terkait penataan dapil sesuai dengan prinsip-prinsip pada UU Pemilu. "Kami nanti akan memberikan beberapa masukan terkait penataan dapil sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu," ucapnya.

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II telah menyepakati mekanisme penerbitan perppu. Ada dua mekanisme yang bisa diterapkan agar tiga provinsi baru di Papua bisa ikut Pemilu 2024, yaitu penerbitan perppu dan revisi UU Pemilu.

## Bawaslu Awasi Masa Tenang

Sementara itu, Komisi II DPR menggelar rapat bersama Bawaslu RI dan DKPP membahas soal rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Dalam rancangan itu, Bawaslu menambah pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yakni terkait penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil).

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Lolly memaparkan perubahan-perubahan pada rancangan peraturan Bawaslu.

Sebelumnya, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Perbawaslu 21/2018 tak diatur bahwa Bawaslu berhak melakukan pengawasan pada masa tenang. Oleh karenanya, Bawaslu mengusulkan agar aturan tersebut ditambahkan.

Lolly memaparkan pihaknya menambah sejumlah poin pengawasan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu, antara lain terkait penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil, penetapan paslon pada pilpres, masa tenang, dan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD.

Terkait Pelanggaran KPU Selain itu, dalam pasal yang sama, Bawaslu juga mengusulkan agar mereka juga

dapat melakukan pengawasan pada empat tahapan lainnya yang sebelumnya tak diatur. Pertama, pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Kedua, pada tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, saat penetapan pasangan calon pada Pemilu presiden dan wakil presiden. Keempat, saat tahapan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, masa pengawasan Bawaslu dalam tahapan



Pemerintah dan DPR menyepakati 3 provinsi baru di Papua ikut Pemilu di tahun 2024 ini. Ilustrasi. (Foto-dok)

Pemilu yang minim banyak dikritisi.

Salah satu kritik datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti yang menekankan masa kerja Bawaslu selama 5 tahun harus dioptimalkan, jangan hanya melakukan pengawasan pada 75 hari masa kampanye. (hiski,ant,rls/dya)

## RANCANGAN PERBAWASLU NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Rancangan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;
5. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemukuh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
7. Penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
8. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
9. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; sanaan kampanye dan dana kampanye;
10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
11. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
12. Proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
13. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
14. Proses penetapan hasil Pemilu.

DALAM RANCANGAN TERBARU, PASAL TERSEBUT DIUBAH MENJADI:  
 PASAL 3 AYAT (1) HURUF B RANCANGAN PERATURAN BAWASLU:

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
8. Penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
9. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
10. Masa tenang;
11. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
12. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
13. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
14. Proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
15. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
16. Proses penetapan hasil Pemilu; dan
17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD

# JALAN-JALAN KE ISTANA PARA RAJA DI PULAU JAWA



Berwisata sambil menapaki jejak sejarah tampaknya bisa menjadi pilihan saat liburan bersama keluarga. Salah satu destinasi wisata sejarah yang dapat Anda kunjungi di Pulau Jawa adalah keraton. Ada dimana saja?







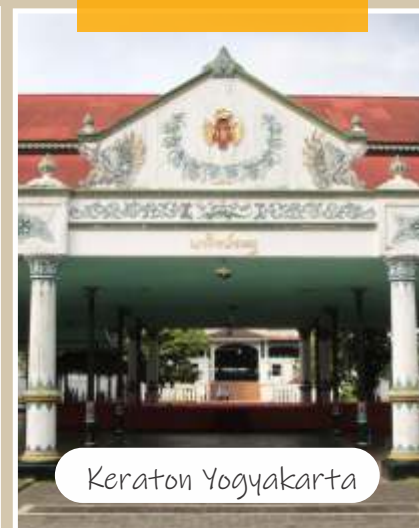
Keraton Kartasura



Keraton Kasepuhan Cirebon



Keraton Kanoman



Keraton Yogyakarta

**SELAIN** bentuk dan arsitektur yang menarik, keraton sering dikunjungi wisatawan buat wisata edukasi karena memiliki nilai bersejarah. Setiap keraton memiliki sejarah yang berbeda-beda. Selain bisa berlibur, Anda juga dapat menambah wawasan dengan berkunjung ke Keraton. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini keraton yang dapat Anda kunjungi untuk menghabiskan waktu liburan, diantaranya:

### KERATON KARTASURA

Mengutip dari [visitjawatengah.jatengprov.go.id](http://visitjawatengah.jatengprov.go.id), Keraton Kartasura terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah atau sekitar 11 kilometer dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Di keraton ini ada banyak sekali peninggalan atau reruntuhan untuk membuktikan keberadaan Keraton Kartasura sebelum pindah ke Surakarta, namun kini hanya tersisa beberapa puing Keraton yang dapat dilihat.

Disadur dari buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (2007) karya M.C. Ricklefs, berikut ini sejarah singkat tentang berdirinya Keraton Kartasura. Pada pertengahan abad ke-16, muncul dua kekuatan baru di daerah subur di pedalaman Jawa Tengah, yaitu Pajang dan Mataram. Mataram kemudian menghasilkan dinasti Jawa modern yang kuat dan lama.

Menurut babad-babad Jawa (hlm. 97), penguasa pertama Mataram adalah Kyai Gedhe Pamanahan atau Ki Ageng Mataram. Dia menempati Mataram sekitar 1570-an lalu dan meninggal sekitar 1584. Dalam kronik-kronik Mataram, Pamanahan disebut keturunan raja terakhir Majapahit.

Dalam kronik-kronik Jawa (hlm. 98), Putra Pamanahan yaitu Panembahan Senapati Ingalaga diceritakan sebagai pemrakarsa perluasan Kerajaan Mataram. Saat orang-orang Belanda pertama tiba di Jawa pada akhir abad 16, Mataram sudah menjadi kerajaan kuat dan sedang mengembangkan kekuasaannya.

### KERATON KASEPUHAN CIREBON

Dahulunya, Keraton Kasepuhan Cirebon bernama Keraton Pakungwati, dengan Caruban Nagari sebagai kerajaannya. Mengutip dari

[cirebonkota.go.id](http://cirebonkota.go.id), saat ini Keraton Kesepuhan menjadi objek wisata unggulan Kota Cirebon. Keraton yang didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah pada 1529 M atau 1451 tahun saka oleh Pangeran Mas Mochammad Arifin II bergelar Panembahan Pakungwati I (cicit dari Sunan Gunung Jati) yang menggantikan tahta dari Sunan Gunung Jati pada 1506, beliau bersemayam di dalem Agung Pakungwati Cirebon.

Ada banyak objek daya tarik wisata yang disuguhkan di Keraton Kasepuhan Cirebon seperti acara Pesisir Cirebon yang di dalamnya terdapat acara kirab budaya yaitu pawai budaya yang diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kubingan serta Kabupaten Indramayu.

Dalam acara Kirab Budaya ini, masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan atraksi budaya yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Selain itu, ada juga festival topeng nusantara, festival keraton nusantara, grebeg syawal, dan lain-lain.

### KERATON KANOMAN

Keraton Kanoman didirikan oleh Sultan Kanoman I (Sultan Badridin) turunan ke VII dari Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) pada tahun 510 tahun Saka atau tahun 1588 Masehi.

Pada Keraton ini masih terdapat benda atau barang seperti dua kereta bernama Paksi Naga Liman dan Jempana yang masih terawat adil dan tersimpan di museum. Di dekat kereta, terdapat bangsal Jinem, atau Pendopo bagi penerima tamu, penobatan sultan dan pemberian restu suatu perkara seperti Maulid Nabi. Selain itu, di anggota tengah Kraton terdapat kompleks susunan properti bernama Siti Hinggil.

Ada hal menarik yang dapat Anda jumpai ketika berkunjung ke Keraton ini. Hal yang menarik dari Keraton di Cirebon adalah mempunyai piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak hanya di Keraton, piring-piring keramik itu bertebaran nyaris di seluruh situs bersejarah di Cirebon, werta yang tidak kalah penting dari Keraton di Cirebon adalah keraton selalu menghadap ke utara.

### KERATON YOGYAKARTA

Keraton Yogyakarta merupakan jantung Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, sejarah dan budaya dari jaman dahulu masih sangat dijaga hingga saat ini. Keraton Yogyakarta terletak di pusat kota Yogyakarta, tidak jauh dari jalan Malioboro.

Di Keraton ini banyak koleksi kesultanan yang masih terjaga. Keraton Yogyakarta terletak pada titik tengah tepat di antara Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi. Keraton Yogyakarta adalah simbol kejayaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga jantung kebudayaan Jawa.

Ada banyak hal menarik yang bisa didapatkan saat berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Dari bangunannya yang megah dan penuh dengan nuansa Jawa, banyaknya benda koleksi raja dan keluarganya, pertunjukan seni, hingga kehidupan para abdi dalem.

Apabila Anda datang pada saat yang tepat, Anda juga dapat menyaksikan beragam upacara adat yang digelar di keraton seperti Nyebar Udhik-udhik, Caos Dahar, Grebeg, dan masih banyak lagi. Selain sebagai tempat tinggal raja dan permaisuri serta keluarganya, banyak area Keraton Yogyakarta juga menjadi tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh siapapun.

### KERATON SURAKARTA

Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta merupakan istana resmi Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan telah didirikan pada tahun 1744 oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II. Luas lahan Keraton ini sampai dengan 147 hektare, kawasan keraton ini meliputi area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Gapura Gladag, dan Masjid Agung Surakarta.

Sejarah berdirinya Keraton Surakarta berkaitan dengan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota. Saat Amangkurat II naik takhta, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Wanakarta yang kemudian disebut dengan Kartasura. Pemindahan ini disebabkan oleh adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo.

Pada 1743, peristiwa Geger Pecinan yang dipelopori oleh

penduduk Tionghoa menghancurkan Keraton Kartasura. Pakubuwono II yang menjadi sasaran pemberontak karena berpihak kepada Belanda pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. Sekembalinya ke Kartasura, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala. Desa Sala dipilih karena beberapa faktor, tetapi utamanya karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo.

Sungai ini dapat berfungsi sebagai penghubung untuk memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, dan politik kerajaan. Pada 1746, Keraton Surakarta di Desa Sala mulai ditempati meskipun pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Pakubuwono II mendiami keraton sampai hari wafatnya, yaitu pada 1749. Setelah itu, pembangunan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh para penerusnya dan ditambahkan bangunan seperti Masjid Agung, Sitihihinggil, dan Pintu Srimanganti.

Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram menghadapi perlawanan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta untuk Hamengku Buwono I dan Nagari Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sejak saat itu, Keraton Surakarta menjadi istana dari istana dari Kasunanan Surakarta. (berbagai sumber/dya)



Keraton Surakarta



# BUAH PIR

# UNTUK

# KESEHATAN:

# CEGAH DIABETES

# HINGGA

# DETOKSIFIKASI



MANFAAT buah pir untuk kesehatan diperoleh berkat beragam kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah tersebut. Dengan rasa yang manis, ternyata ada beberapa manfaat yang ditawarkan terhadap seseorang jika mengonsumsinya.

Dilansir situs Medical News Today, buah pir penuh dengan antioksidan esensial, senyawa tanaman, dan serat makanan. Selain tiga unsur tersebut, pir juga diklaim sebagai buah yang bebas dari lemak dan kolesterol. Di dunia ini, buah pir tercatat memiliki lebih dari 3000 jenis. Semua jenis tersebut dibedakan dengan variasi ukuran, bentuk, rasa, dan tekstur kerenyahannya. Kendati jenisnya banyak, kandungan yang terdapat dalam buah pir setidaknya hampir serupa dan dapat digunakan untuk menjaga kesehatan seseorang.

Lantas, apa saja nutrisi yang ada dalam buah pir dan apa manfaatnya untuk kesehatan? Kandungan Nutrisi dalam Buah Pir Manfaat buah pir untuk kesehatan dapat dilihat dari berbagai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, orang yang membutuhkan nutrisi tertentu dapat memakan buah ini untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

## MENURUNKAN RESIKO DIABETES

Berdasarkan catatan Web MD, manfaat buah pir untuk kesehatan salah satunya adalah mampu menurunkan resiko seseorang terkena diabetes. Lengkapnya, terdapat data bahwa dari kisaran 1-100, pir berada

di angka 20 yang cenderung rendah resiko terhadap kenaikan gula darah.

## MENGOBATI DIVERTIKULOSIS

Penyakit kantung besar menonjol di usus besar—mampu mengakibatkan infeksi dan radang usus-- ini ternyata dapat diobati dengan bantuan serat yang terkandung dalam buah pir. Medical News Today menyebut bahwa terdapat tinjauan yang menyarankan konsumsi serat sebanyak 30 gram setiap hari demi menyembuhkan penyakit tersebut.

## MENINGKATKAN KESEHATAN USUS

Pir diklaim mampu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung serat larut yang menjaga stabilitas kinerja usus. Dengan serat tersebut, feses akan dilunakan dan digembungkan agar pencernaan yang terjadi di usus dapat diproses dengan lancar.

## MENGOBATI KARDIOVASKULAR

Kardiovaskular merupakan penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Sebuah studi pada tahun 2019 menyebut bahwa pir mampu mengatasi penyakit tersebut. Hal ini diklaim karena pir dapat menurunkan tekanan darah dan nadi seseorang.

## MEMBANTU DETOKSIFIKASI

Detoksifikasi merupakan proses pembuangan racun dari tubuh

manusia yang terjadi secara alami, misalnya melalui “buang air besar”. Pir yang mengandung air dan gula alami diklaim mampu membantu proses pembuangan racun tersebut dengan melancarkan pencernaan.

## MELAWAN RADIKAL BEBAS

Radikal bebas akan berkembang saat tubuh manusia mengubah makanan menjadi energi. Namun, ini akan berbahaya karena radikal bebas juga punya potensi dalam menumbuhkan kanker di tubuh seseorang. Nutrisi dalam buah pir dipercaya mampu melawan dan melindungi sel tubuh dari kerusakan yang diakibatkan radikal bebas.

## MENGOBATI RADANG

Dalam manfaat ini, buah pir berperan sebagai anti-inflamasi. Dengan kata lain, buah pir dapat bermanfaat sebagai obat radang berkat antioksidan flavonoid yang terkandung di dalamnya. Selain itu, flavonoid tersebut juga dianggap mampu menurunkan resiko penyakit jantung dan diabetes.

## MENURUNKAN RISIKO PENYAKIT JANTUNG DAN STROKE

Antioksidan Procyanidin yang ada dalam buah pir dapat melunakkan kekakuan jaringan jantung. Selain itu, penyakit stroke juga dapat diobati dengan mengonsumsi buah ini karena pelunakan juga mempengaruhi kekakuan otot dan saraf.

## MEMBANTU MENURUNKAN BERAT BADAN

Buah pir mengandung banyak air dan serat, namun kalori yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak. Dengan mengonsumsi pir, seseorang akan cepat merasa kenyang dan tubuh yang biasanya mengonsumsi banyak makanan akan mengurangi porsi. Dengan begitu, pir mampu membuat orang kenyang tanpa harus makan banyak dan ini mampu menurunkan berat badan orang tersebut. (berbagai sumber/dya)

*Buah Pir*





# Jangan Tertipu! Ini 'Benda' Produksi Cina Bukan Harley

**DESAIN** motor memang bisa menentukan penjualan. Wajar jika antar pabrikan punya desain mirip-mirip, seperti produsen motor asal Cina Benda yang memperkenalkan motor dengan desain cruiser yang mirip banget dengan Harley-Davidson.

Dikutip visordown, Benda memperkenalkan Cruiser terbaru yang disapa BD500. Meski terlihat bongosor, motor Cina yang satu ini dijamin lebih bertenaga dan lebih ringan. Soal performa, motor cruiser Cina ini menggondong mesin V4 berkapasitas 496cc. Memang Benda bukan kali pertama memperkenalkan motor bongosor, karena Benda sebelumnya sudah memperkenalkan BD476 dengan kapasitas mesin 1.198cc namun bukan V4.

Menyandang label motor China, Benda BD500 diklaim memiliki tenaga 10 HP lebih besar dibandingkan dengan Honda CMX500 Rebel. Meski Benda BD500 memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan Honda Rebel.

Soal desain, jangan sampai tertipu ya, karena bisa dipastikan Cruiser ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Harley-Davidson atau Rebel. Akan tetapi mungkin bukan hal dosa besar jika Benda BD500 mengadopsi desain Cruiser, karena sah-sah saja melahirkan motor bergaya Cruiser. Cukup disesalkan, Benda tidak

menjelaskan berapa harganya. (berbagai sumber/dya)

## ●●●● BEBERAPA MOTOR MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN HD

### HONDA REBEL 300

Honda Rebel 300 merupakan cruiser buatan Jepang yang cukup populer. Cocok digunakan pemula yang baru saja mengendarai motor tipe cruiser. Motor ini dilengkapi mesin 286 cc silinder tunggal. Kelebihan Honda Rebel 300 adalah harganya yang terjangkau, suku cadang mudah ditemukan, hingga mudah dan murah untuk merawatnya.

Spesifikasi Honda Rebel 300: -ABS Standar -Transmisi 6-percepatan -Mesin : 286 cc silinder tunggal -Daya : 25 HP -Kisaran Harga : USD4.899

### KAWASAKI VULCANS

Vulcan S merupakan tipe motor cruiser yang sangat cocok bagi pengendara yang mencari motor kuat, ringan, dan serbaguna. Kawasaki Vulcan S menawarkan mesin 650 cc



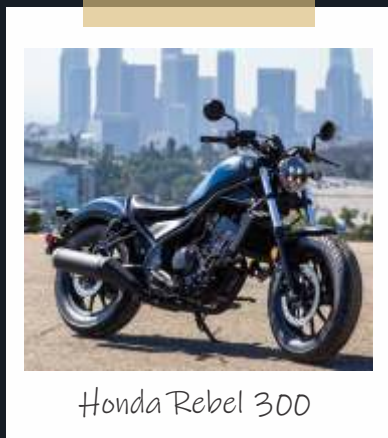
dan tenaga 53 HP. Selain itu, desainnya juga klasik, perawatan mudah dan murah, serta layanan aftermarket yang baik.

Spesifikasi Kawasaki Vulcan S: -ABS Standar -Transmisi 6-Kecepatan -Mesin : 649 cc paralel kembar -Daya : 53 HP -Kisaran Harga : USD7.099

### YAMAHA BOLT

Motor cruiser buatan Yamaha ini memiliki mesin kuat dan desain elegan. Dengan mesin 950 cc dan 65 HP, Yamaha Bolt menjadi salah satu cruiser terbaik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Yamaha Bolt juga memiliki rasio power to weigh besar, banyak tenaga dan torsi, dan cocok untuk berkendara di perkotaan maupun perjalanan lain.

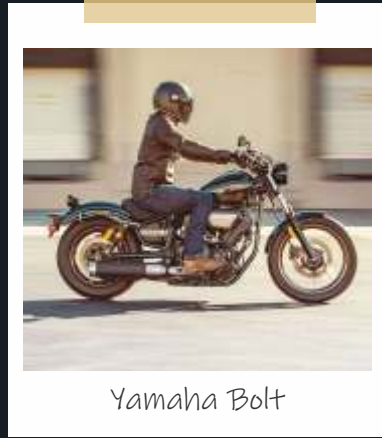
Spesifikasi Yamaha Bolt: -Transmisi 5-percepatan -Mesin : 942 cc V-Twin -Daya : 65 HP -Kisaran Harga : USD7.999. (berbagai sumber/dya)



Honda Rebel 300



Kawasaki Vulcan S



Yamaha Bolt



# Meski Populer, Tren Fesyen Ini Awalnya Dibenci

**SETIAP** tahunnya, industri fesyen selalu menampilkan tren-tren baru, baik dari fesyen item nya ataupun gaya berpakaian. Kehadiran tren-tren tersebut menjadi penanda bahwa fesyen di dunia selalu berevolusi. Meski populer, beberapa tren fesyen yang muncul sempat memicu perdebatan, tidak semua penikmat fesyen menyukai tren yang berkembang tersebut. Berikut rangkuman beberapa tren fesyen yang kontroversial di kalangan penikmat fashion, ada yang kamu tahu Beauties?

## CROCS

Memiliki bahan nyaman dan juga praktis, menjadikan Crocs disukai dari segala kalangan. Meski populer, kehadiran awal Crocs justru menerima kritik, terutama dari penikmat fashion. Para fashionista tersebut mengungkapkan bahwa Crocs bukanlah hal yang cocok dalam dunia fashion, modelnya yang monoton serta ukuran yang besar membuat tampilan menjadi kurang menarik dan tidak fashionable sama sekali. Hingga saat ini, Crocs terbelang menjadi salah satu sandal dengan popularitas tinggi, bahkan baru-baru ini Crocs



Crocs

mengeluarkan produk sandalnya hasil kolaborasi dengan brand mewah, Balenciaga.

## CELANA SEPEDA

Jadi tren di tahun 90-an, bike shorts atau celana sepeda belakangan ini kembali populer, sejumlah selebriti hingga influencer kembali terlihat mengenakan celana ketat tersebut. Meski digemari, menurut penikmat fashion, celana sepeda seharusnya tetap digunakan sesuai kebutuhannya yakni hanya bersepeda saja, modelnya yang ketat membuat celana sepeda sulit dipadukan dengan outfit lainnya serta tampilannya tidak membuat gaya pakaian menjadi fashionable atau menarik untuk dilihat.

## CELANA LOW RISE

Mengusung konsep Y2K, populernya celana low-rise saat ini, justru mengantarkan kritik kepada para penikmat fashion. Potongan pada celana low-rise terkesan kuno, dan membuat bentuk tubuh tidak indah.

Para penikmat fesyen juga mengatakan bahwa celana low-rise hanya cocok di beberapa kalangan. Meski penuh kritik, popularitas celana low-rise kian meningkat, terutama di kalangan idol Korea, contohnya Jennie Blackpink ataupun soloist Hyuna, beberapa kali tertangkap mengenakan celana low-rise sebagai busana sehari-hari mereka.

## MICRO BAG

Meski tampilannya imut dan mungil, penikmat fesyen justru mempertanyakan mengapa micro bag bisa menjadi tren fesyen. Dilihat dari kegunaannya micro bag justru seperti menghilangkan esensi dari sebuah tas itu sendiri. Mereka lebih setuju jika micro bag dikatakan sebagai aksesoris bukan sebuah tas.

Disebut micro bag, karena tas ini



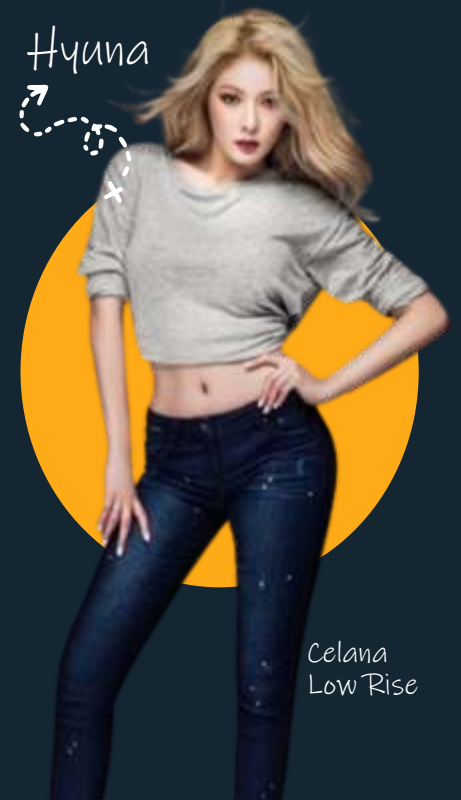
sangat mini. Yakni hanya muat smartphone, kartu ATM serta lipstick. Tas ini pertama kali ditampilkan saat fashion show Milan berlangsung. Sederet model membawa beberapa micro bags layaknya gantungan kunci di tas yang diselipkan pada tas berukuran lebih besar. Ada juga beberapa model yang menjinjingnya langsung. Sejak saat itu, tas ini langsung menjadi incaran kaum hawa.

Untuk gaya kasual, tas imut ini tinggal diselempangkan di bahu menggunakan strap. Saat ada acara formal di malam hari, tas ini juga cocok lho dipakai sebagai pengganti clutch. Tas ini hadir dengan beragam model yang menawan dan warna cantik khas musim semi. Sesuaikan warna outfit kamu dan tas ini pun bakal jadi aksesoris andalan.

## SKINNY SUNNIES

Populer di kalangan para selebriti hingga influencer, sunglasses dengan frame berukuran kecil ini dijadikan

aksesori yang paling cocok jika ingin menampilkan gaya 90-an. Modelnya yang kecil dan tipis juga sangat enak dibawa kemanapun. Meski ikonis, sebagian fashionista menyatakan kacamata sunnies sendiri lebih menghilangkan fungsi kacamata itu sendiri, dilihat bagaimana kacamata tersebut sangat kecil, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan UV sepenuhnya, padahal seperti yang kita tahu, salah satu kegunaan kacamata sendiri yakni melindungi mata dari sinar UV yang menyengat, dan kacamata sunnies tidak memberikan efek tersebut. (berbagai sumber/dya)



Celana Low Rise



Celana Sepeda



Micro Bag



Skinny Sunnies



### Gelagat Ganjal Penuntasan....(dari hal 1)

**KOMISIONER** Komnas HAM Choirul Anam mengatakan video yang beredar di publik telah disesuaikan dengan skenario. Artinya ada bagian yang tidak dimuat dalam video tersebut. "Dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap, itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat," kata Anam saat konferensi pers, Kamis (1/9).

Pengaburan fakta tersebut dinilai Komnas HAM sebagai bentuk obstruction of justice. Dalam kesempatan itu Komnas HAM memutar video CCTV yang tidak tersebar di publik. Menurut Anam, video itu penting untuk konstruksi peristiwa yang terjadi.

"Video yang tersebar di publik ini tidak ada padahal video ini yang sangat penting untuk konstruksi peristiwa. Dan ini kami dapat adalah raw material jadi memang ini potongan untuk menunjukkan video ini harusnya masuk ke rangkaian peristiwa," kata Anam.

Anam menjelaskan apa saja yang terjadi dalam video tersebut. Pertama pemanggilan 2 ADC atau ajudan Ferdy Sambo ke lantai atas. Saat itu Sambo ingin tahu apa yang terjadi di Magelang. "Ini harusnya video ini menjadi momentum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, ini gak ada, kalau ini ada maka kasus akan terang benderang, tapi ini enggak ada," kata Anam.

Menurut Anam video itu di reka adegan saat rekonstruksi beberapa waktu lalu. Bagian ini dinilai penting karena menjadi pemicu eksekusi Yosua. "Kemarin di rekonstruksi ada peristiwa di lantai 3, dan ini videonya, kami ambil raw material, seperti yang kami tanyakan ke FS (Ferdy Sambo), ketika datang ke Saguling apa yang terjadi di Magelang, peristiwa itulah yang mewarnai apa yang terjadi di Duren Tiga 46," kata Anam.

Komnas HAM telah selesai menganalisis dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Komnas HAM menemukan ada 4 pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya, ada 4 poin, pertama hak untuk hidup. Terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat (1/9).

Beka mengungkapkan pembunuhan terhadap Yosua itu dilakukan dengan terencana. Perencanaan pembunuhan dilakukan di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Jakarta Selatan.

"Extrajudicial killing terhadap Brigadir J dilakukan dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling

III," ujarnya.

Meski demikian, Beka mengatakan pembunuhan Yosua tidak bisa dijelaskan secara detail. Alasannya, banyak tindakan yang menghambat penyidikan. "Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan berbagai pihak," tuturnya.

Di sisi lain, Polri menetapkan total tujuh tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Kini Irjen Ferdy Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. "IJP FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, KP CP, KP BW, dan AKP IW," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/9).

Di sisi lain, Mantan hakim agung Mahkamah Agung (MA), Prof Dr Topane Gayus Lumbuun, menyoroti pasal yang disangkakan penyidik Polri ke Ferdy Sambo dkk di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Gayus menyoroti penggunaan 'subsider' dalam pasal itu.

"Saya khawatir di Pasal 340 subsider, subsider ini pengganti, jadi kalau nggak kena itu, ini (pasal 338), kenapa nggak juncto, ini perlu dikonstruksi dakwaan tadi, artinya kalau nggak 340, 338, itu cuma 15 tahun itu, sudah diramalkan gitu," ujar Gayus dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun Pengawasan Demokratis Polri: Kematian Yosua dan Perkara Sambo', Kamis (1/9).

Gayus berharap nantinya jaksa akan mendakwa Sambo dengan pasal kumulatif, yakni Pasal 340 dan 338. "Kenapa disebut subsider, subsider itu pengganti, jadi 338 itu pengganti 340, 338 itu hanya 15 tahun. Semestinya juncto atau kumulatif, karena memang jenis-jenis nantinya dakwaan hakim akan melihat itu, sangat melihat itu," ucapnya.

Gayus lantas mencontohkan perkara Marsinah. Saat itu, di tingkat kasasi terdakwa dibebaskan karena konstruksi kasus yang membuat hakim ragu. Dia berharap kasus Ferdy Sambo di persidangan nanti tidak seperti itu. "Seperti hakim (di perkara) Marsinah itu hakim yang teruji dan berkualitas yaitu Adi Andojo, siapa yang nggak kenal hakim Adi Andojo, dia bebaskan 9 orang itu, kalau hakimnya lain mungkin orang akan bertanya 'wah ini hakim bagaimana karakternya', ini Pak Adi Andojo, dia bebaskan," ucap Gayus.

"Karena apa, konstruksi dipecah di antaranya saksi mahkota silang terus, ragu, sebagai hakim yang adil, jujur, cerdas, dia ragu, daripada saya menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya bebaskan 10 yang bersalah, itu konsep memang, bagi hakim gitu semua pikirannya, tidak mudah," imbuhnya.

Diketahui, dalam kasus pembunuhan Yosua, polisi telah menetapkan lima tersangka. Mereka ialah Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Bharada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf.

Sementara itu, Ferdy Sambo resmi diberhentikan tidak dengan hormat

atau PTDH dari institusi Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir J. Pemecatan itu dilakukan setelah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kadiv Propam Polri tersebut telah rampung.

Komnas HAM juga menemukan adanya perintah mencuci baju untuk menghilangkan gunshot residue (GSR) atau residu tembakan. Perintah itu berkaitan dengan upaya penghilangan barang bukti atau obstruction of justice di kasus pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J). "Sepanjang yang kami pantau bagi Komnas menemukan jejak digital, itu keistimewaan jaman modern, walaupun dihapus dihilangkan, tapi jejak digital itu masih bisa dicari. Misalnya foto tanggal 8 itu kan jejak digital, ada komunikasi disuruh mencuci baju itu ditemukan," kata Choirul Anam.

"Kan kalau baju dicuci GSR yang ada dalam letupan tembakan jadi hilang, itu menghilangkan jejak. Itu ada di komunikasi, ada disuruh melenyapkan," sambungnya. Selain menghilangkan bukti-bukti percakapan, ada upaya penghilangan detail-detail video. Anam mengatakan terdapat sejumlah video yang dinilai penting tetapi tidak ditampilkan. "Sampai detail-detail video ada yang harusnya kalau memang mau bekerjanya ke penegak hukum itu secara baik, ya video-video penting itu ya harusnya ditampilkan sehingga orang juga tau," katanya.

### Dugaan Kekerasan Seksual Mencuat Lagi

Sementara itu, Kejaksaan Agung

(Kejagung) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersangka pelanggaran pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice terkait pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh Irjen Ferdy Sambo. Ada 6 SPDP yang diterima dari Bareskrim Polri.

"Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, atas nama 6 (enam) orang tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Kamis (1/9).

Komnas HAM juga menduga peristiwa pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) didahului oleh adanya peristiwa kekerasan seksual di Magelang terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Polri bakal mendalami soal dugaan tersebut.

"Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas PA (perlindungan anak) akan ditindaklanjuti sebagaimana arahan Pak Irwasum selaku Ketua Timsus," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).

Agus mengatakan pihaknya bakal mendalami berdasarkan fakta maupun alat bukti. "Dan apapun hasil pendalaman akan didasari fakta dan alat bukti yang ada," katanya. (hisk,rls,ant/dya)

## NAMA TERSANGKA OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DITERIMA KEJAGUNG

- Tersangka FS atau Ferdy Sambo
- Tersangka HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri
- Tersangka AN atau Kombes Agus Nurpatia selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri
- Tersangka ARA atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri
- Tersangka CP atau Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
- Tersangka BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
- Tersangka IW atau AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri

## 4 PELANGGARAN HAM DALAM KASUS BRIGADIR J SESUAI ANALISIS KOMNAS HAM YAITU:

- 1. Pelanggaran Hak Untuk Hidup yang dijamin dalam Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999
- 2. Pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999
- 3. Tidak Adanya Obstruction of Justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J
- 4. Pelanggaran Hak Anak yang dijamin dalam Pasal 52 dan 58 UU No 39 Tahun 1999

# RI Alami Deflasi Terdalam 0,21% per Agustus, Ancaman Besar Mengekor

**JAKARTA**-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,21 persen secara bulanan atau month to month. Deflasi didorong oleh penurunan harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras.

"Secara bulanan, ini deflasi terdalam sejak September 2019, saat itu deflasi 0,27 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis (1/9).

Sementara itu secara tahunan, inflasi Agustus 2022 mencapai 4,69 persen dan secara tahun kalender 3,63 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan tekanan inflasi akan terus mengalami peningkatan ke depan.

Hingga akhir 2022, inflasi diperkirakan akan mendekati level 5 persen. Lada tahun depan, Perry mengatakan tingkat inflasi juga berisiko melebihi level 4 persen, seiring dengan ketidakpastian global yang masih sangat tinggi.

Perry mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah telah memberikan arahan untuk segera melakukan langkah pengendalian inflasi pangan, dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, kerja sama antardaerah, operasi pasar, hingga menggunakan anggaran darurat di pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

Adapun Jokowi sebelumnya memamerkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2022 mencapai 5,44 persen dan inflasi 4,9 persen pada Juli 2022. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membanggakan capaian tersebut sekalipun angka inflasi ini sudah melebihi target inflasi 3 persen. "Nanti saya mau bisik-bisik ke Pak Richard (Komisaris PT Freeport Indonesia), berapa growth sama inflasi di Amerika, saya yakin masih lebih baik kita," kata Jokowi, Rabu (31/8).

Faisal memperkirakan jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter maka inflasi bisa terdorong hingga 0,82 percentage point (ppt).

Jika harga Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter maka inflasi akan terdorong hingga 0,33 ppt.

Sementara itu, simulasi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamina menjadi Rp17.000/liter, Solar menjadi Rp9.000/liter dan Pertalite menjadi Rp10.000/liter akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,06%-0,12%.

Kenaikan inflasi inti diperkirakan akan membuat Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga nya pada tahun ini. Bank Mandiri memperkirakan BI masih bisa menaikkan suku bunga acuan hingga 50 bps pada tahun ini sehingga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,25%.

Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana juga mengingatkan tekanan inflasi akan meningkat ke depan. Karena itulah, BI diperkirakan masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan hingga 75 bps hingga akhir tahun ini.

"Produsen akan menaikkan harga output barang di tengah kenaikan ongkos produksi sehingga inflasi inti akan meningkat hingga 3,9% pada akhir tahun," tutur Wisnu, kepada



Harga bawang merah yang turun dan stabil menjadi salah satu pendorong deflasi di bulan Agustus. Ilustrasi. (Foto-dok)

CNBC Indonesia. Sebagai catatan, pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga subsidi BBM, termasuk Pertalite dan Solar.

Data historis BPS menunjukkan inflasi akan melonjak tajam begitu ada kenaikan harga BBM. Contohnya, pada 18 November 2014 lalu saat Presiden Joko Widodo langsung menaikkan harga BBM subsidi rata-rata sebesar 33,57%.

Pada November 2014, inflasi tercatat 1,50% sementara pada Desember menyentuh 2,46%. Secara keseluruhan tahun, inflasi 2014 menembus 8,36%.

Kenaikan inflasi terutama terjadi pada angkutan transportasi serta produk makanan jadi. Selain BBM, Margo secara khusus menyoroti terus naiknya harga beras. Dalam perhitungan bobot inflasi, beras merupakan penyumbang inflasi

terbesar.

"Harga beras sudah naik pada Agustus. Beras mengalami inflasi sebesar 0,54% pada Agustus. Andil inflasinya 0,016%. Pergerakan harganya perlu diperhatikan karena beras bobotnya besar," tutur Margo, saat konferensi pers, Kamis (1/9).

Dia menambahkan harga telur juga terus naik sehingga harus diperhatikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga telur ayam merupakan sedikit sembako yang harganya terus merangkak naik.

Harga telur ayam ras dibanderol Rp 31.500 per kg pada Selasa (30/8/2022). Harga tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang 2022. Sejak Januari 2022 hingga 23 Agustus 2022, harga telur tidak pernah menyentuh level Rp 31.000 per kg. (hiski,rls,ant/dya)

## Ancaman Kenaikan BBM

Inflasi inti pada Agustus tercatat 0,38% (mtm) dan 3,04% (yoy). Inflasi inti (yoy) adalah yang tertinggi sejak November 2019 (3,08%). Inflasi inti di atas 3% juga menjadi yang pertama kalinya terjadi sejak Desember 2019 (3,02%).

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan pergerakan inflasi inti diperkirakan bakal terus merangkak naik ke depan, terutama karena pelonggaran mobilitas dan membaiknya perekonomian domestik. Bila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi maka inflasi inti dan umum akan terkerek naik. "Akan ada kenaikan inflasi tajam yang tidak hanya datang dari first round impact akibat kenaikan harga BBM tetapi juga second round impact dari kenaikan harga barang dan jasa, seperti transportasi," tutur Faisal, dalam MacroBrief.

## PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN AGUSTUS 2022

Berita Resmi Statistik No. 62/09/Th.XXV, 1 September 2022

